

Pemerintah Kota Banjarbaru Tindaklanjuti Rekomendasi DPRD atas Pertanggungjawaban APBD 2022



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/379545/pemkot-banjarbaru-tindaklanjuti-rekomendasi-dprd-atas-pertanggungjawaban-apbd-2022>

Pemerintah Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan telah menindaklanjuti rekomendasi DPRD atas laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2022. Kami sudah menindaklanjuti setiap rekomendasi yang disampaikan DPRD atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Pernyataan wali kota disampaikan usai rapat paripurna dengan agenda keputusan bersama atas raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 di gedung DPRD setempat.

Menurut wali kota, rekomendasi yang disampaikan DPRD termuat sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas pengelolaan keuangan yang dilakukan Pemkot Banjarbaru tahun anggaran 2022. Sebagian dari rekomendasi DPRD maupun BPK RI sudah ditindaklanjuti sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku sehingga tidak ada masalah karena tindaklanjut telah dilakukan mengacu rekomendasi. Diketahui, rekomendasi yang telah disampaikan DPRD melalui rapat paripurna meliputi dua temuan dari sisi pendapatan dan lima temuan tentang belanja, kemudian empat temuan mengenai aset daerah.

Juru bicara Badan Anggaran DPRD Nurkhalis Ansyari menyebut, dari sisi pendapatan daerah pengelolaan retribusi belum sesuai ketentuan dan pengelolaan parkir

di Rumah Sakit Daerah Idaman belum maksimal. Kemudian, lima temuan sisi belanja mulai dari satuan biaya honorarium yang tidak sesuai Perpres, realisasi belanja barang pada sekretariat DPRD dan Disdik serta DKP3 hingga kekurangan volume pekerjaan.

Sedangkan terkait aset mulai dari pengelolaan kas dan aset belum tertib, pengelolaan persediaan juga belum tertib hingga pengelolaan piutang retribusi sewa tanah tidak memadai dan potensi tidak tertagih. Sejumlah temuan yang menjadi catatan audit BPK mulai dari kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan peraturan terhadap perundang-undangan kami minta segera ditindaklanjuti.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/379545/pemkot-banjarbaru-tindaklanjuti-rekomendasi-dprd-atas-pertanggungjawaban-apbd-2022>, 20 Juli 2023.
2. <https://www.beritaja.com/pemkot-banjarbaru-tindaklanjuti-rekomendasi-dprd-atas-pertanggungjawaban-apbd-2022-beritaja-58921.html>, 20 Juli 2023.

Catatan Berita:

Pengaturan Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN/APBD sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003

- 1) Pasal 31 ayat (1); Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Penjelasan dari Pasal ini menyampaikan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah.
- 2) Pasal 31 ayat (2); Laporan keuangan dimaksud setidaknya-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah.
Dilanjutkan dalam penjelasan Pasal tersebut bahwa Laporan Realisasi Anggaran selain menyajikan realisasi pendapatan dan belanja, juga menjelaskan prestasi kerja satuan kerja perangkat daerah.
- 3) Pasal 32 ayat (1); Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
- 4) Pasal 32 ayat (2); Standar akuntansi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan

Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Disampaikan lebih lanjut dalam bagian penjelasan apabila dalam waktu 2 (dua) bulan tidak memberikan pertimbangan yang diminta, Badan Pemeriksa Keuangan dianggap menyetujui sepenuhnya standar akuntansi pemerintahan yang diajukan oleh Pemerintah.